

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada Bab I penelitian ini dan dihubungkan dengan kerangka pemikiran yang ada, maka kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum Kurdi (juga kelompok-kelompok minoritas lain di Turki) yang menunjukkan identitas etnis direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Bahkan sebelum 1991, bahasa Kurdi yang tersebar secara luas dianggap ilegal. Hingga 1999 pun masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi (misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari, lima hari seminggu). Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi semenjak 15 Agustus 1984 karena pemerintah Turki dianggap tidak menghargai hak-hak kultural dan identitas etnis Kurdi. Berbagai upaya diberlakukan untuk membatasi ruang gerak sosio-politis etnis Kurdi. Etnis Kurdi merasa tersingkirkan sehingga konflik panjang antara etnis Kurdi dan pemerintah Turki pun berlangsung hingga kini. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka.
2. Berdasarkan teori Holsti dan juga Goldstein yang membagi sumber konflik dan tipe konflik, maka sumber konflik antara Pemerintah Turki dengan etnis Kurdi antara lain posisi Turki dalam mempertahankan hak

teritorialnya atas keinginan-keinginan separatis Kurdi dalam memperoleh wilayah sendiri, ancaman terhadap integritas negara yang muncul dari upaya-upaya pemberontakan dari Partiya Karkeren Kurdistan (PKK), persaingan militer *vis-à-vis* pemerintahan sipil dalam kancah politik Turki yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap etnis Kurdi, kesenjangan pembangunan di Turki Tenggara, kebijakan-kebijakan pemerintah Turki yang mengeliminir identitas selain Turki termasuk kepada etnis Kurdi, adanya kekerasan atau tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk mewujudkan tertib sosial secara cepat terhadap etnis Kurdi separatis, intervensi asing atas konflik yang berawal dari penguasaan sumber daya alam yaitu sumber daya alam di Kurdistan.

Konflik yang muncul berupa konflik bersenjata dimulai tahun 1984 ketika PKK mengumumkan perang gerilya untuk merespons tekanan-tekanan Pemerintah Turki. Sebagian besar anggota PKK -- antara 3.500 dan 3.800 -- bermarkas di Irak utara, dengan sebanyak 2.000 anggota yang lain ada di Turki. Ketika Uni Soviet bubar, PKK bertransformasi menjadi gerakan militan yang lebih terbuka untuk lebih mengakomodasi nasionalisme dan islamisme. Bendera berlambang palu arit diganti dengan simbol obor. Namun justru konflik bersenjata meningkat. PKK makin meningkatkan serangan bom, termasuk bom bunuh diri, sedang Turki membentuk regu pembunuh (*death squad*) untuk menghabisi para petinggi dan simpatisan PKK. Hingga awal Februari 2008 korban tewas mencapai sekitar 40 ribu orang.

Dalam rangka konflik dengan etnis Kurdi, Pemerintah Turki melakukan penghentian secara paksa konflik yang terjadi antara lain dengan melaksanakan operasi militer. Selain dengan melakukan penggunaan *force* dan ancaman dalam menyikapi konflik yang ada dengan etnis Kurdi, Turki juga berupaya mencapai penyelesaian damai melalui pendekatan politik dan diplomasi. PKK juga merubah tuntutananya kepada Pemerintah Turki pada Maret 1993 yaitu dari kemerdekaan Kurdi menjadi otonomi dalam negara Turki.

3. Prospek hubungan kedua belah pihak akan menjadi lebih baik dengan cara meningkatkan komunikasi, toleransi, dialog serta pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas. Ada beberapa perubahan kebijakan ketika Abdullah Gul menjadi Presiden Turki di akhir tahun 2007. Berbeda dengan para pendahulunya yang mengedepankan kekerasan dalam mengatasi separatisme, Perdana Menteri Tayyip Erdogan mendobrak banyak tabu politik. Erdogan dan pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) membuka lebih banyak kesempatan bagi ekspresi kebebasan etnis Kurdi di Turki. Pemerintahan AKP juga memperbolehkan kemunculan koran, radio, dan televisi berbahasa Kurdi. Kebijakan AKP diarahkan untuk mengakomodasi perbedaan daripada menghapus perbedaan dalam baju keseragaman yang telah lama menjadi pendekatan resmi pemerintah Turki. Erdogan menerapkan kebijakan berorientasi kemakmuran dimana investasi dipompa ke daerah tertinggal, termasuk kawasan Kurdi di tenggara Turki.

Pemerintah Turki juga sudah mengakomodir orang-orang Kurdi dengan adanya keterwakilan mereka di Parlemen dan diberi otonomi khusus di wilayah yang berbatasan dengan sebelah Utara Irak pada 23 Oktober 2007. Fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan juga dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing pihak dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

4. Melihat berbagai kebijakan yang lebih besar memberikan kebebasan terhadap etnis Kurdi di masa Abdullah Gul dan Recep Tayyip Erdogan, pemerintah Turki harus tetap menjaga keseimbangan proporsional antara tuntutan militer dan sensitivitas kaum Kurdi. Yang jelas, masalah Kurdi terbukti lebih mungkin terselesaikan dengan pendekatan politik dan ekonomi ketimbang senjata.

6.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dianalisis mengenai berbagai sumber konflik yang ada di negara-negara lain yang juga didiami oleh etnis Kurdi yaitu Irak, Iran atau Suriah yang juga memiliki jumlah populasi yang cukup besar di negara mereka baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Di tiap negara tersebut memiliki potensi masalah yang berbeda-beda dan hal ini akan menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini memang tidak menjelaskan secara detil hal-hal yang terkait dengan Kurdi di luar Turki karena aspek yang akan dibahas akan semakin luas dan melebar.

Selain itu, dapat juga dianalisis bagaimana faktor keterikatan budaya etnis Kurdi di wilayah Kurdistan mempengaruhi tingkat asimilasinya dengan penduduk asal, sehingga dapat mengeliminir konflik. Kemudian juga melihat apakah faktor pergantian kepemimpinan di Turki di masa depan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hubungan Turki dengan etnis Kurdi. Hal ini juga dapat dianalisis untuk Irak, Iran maupun Suriah.

Penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia dengan metode kualitatif, maka akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dilakukan secara langsung di Turki maupun di wilayah lain seperti Irak, Iran dan Suriah yang wilayahnya ditempati etnis Kurdi. Dengan melakukan penelitian partisipatif atau terjun langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat sehingga dapat membandingkan dengan gambaran yang terdapat dalam dokumen, buku atau jurnal yang tersedia.

Metode yang digunakan juga akan lebih baik jika menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang ada.

